

**PERANSERTA STAKEHOLDER DALAM REVITALISASI KAWASAN  
KERATON KASUNANAN SURAKARTA**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:  
**YANTHI LYDIA INDRAWATI**  
**L2D 003 381**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

## ABSTRAK

Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan dimana cagar budaya berada dengan lahan disekitarnya yang berfungsi untuk mendukung kelestarian cagar budaya itu sendiri yang dikelola oleh Departemen Kebudayaan atau pemilik yang ditunjuk. Menurut Budihardjo (1993), persoalan yang sering muncul dalam pengembangan suatu kawasan, dalam hal ini kawasan bersejarah (cagar budaya) ada 3 unsur (3 Elemen Penggerak dalam Pembangunan Kota) yaitu masyarakat (people) yang menempati kawasan tersebut dalam beberapa periode tertentu dengan latar belakang tertentu. Unsur kedua adalah pihak pemerintah (power) yang mempunyai kewenangan dalam penentuan jenis pemanfaatan kawasan, dan unsur ketiga adalah pihak swasta (profit) yang turut berperan dalam pembangunan kota. Unsur masyarakat dan sejarah sering diabaikan sehingga terjadi ketidakseimbangan tuntutan dan kebutuhan. Oleh karena itu agar upaya pelestarian kawasan cagar budaya dapat berhasil yang utama harus dilakukan adalah mendekati, mengimbuu dan menyadarkan para penentu kebijakan dan pihak swasta tentang pentingnya pelestarian kawasan sebagai salah satu cara melindungi warisan budaya. Revitalisasi merupakan upaya peningkatan kualitas kawasan dengan melakukan perbaikan-perbaikan fisik dan menyuntikan suatu fungsi baru pada kawasan. Usaha pelestarian dalam hal ini revitalisasi kawasan cagar budaya merupakan suatu usaha yang memerlukan kerjasama antara stakeholder baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Studi ini penting untuk dilakukan mengingat Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta merupakan inti dari kawasan budaya di Surakarta yang merupakan landmark dan identitas bagi kota Surakarta dengan potensi dan sejarah yang dimilikinya. Terlepas dari itu semua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam usaha pelestarian kawasan ini baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, dukungan masyarakat, konflik antar aktivitas maupun imbas dari proses modernisasi.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk peranserta masing-masing stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Adapun sasaran studi ini adalah identifikasi perkembangan aktivitas di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta., identifikasi potensi dan permasalahan yang terkait dengan revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, identifikasi karakteristik stakeholder yang terkait dengan revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, identifikasi bentuk peranserta stakeholder dalam revitalisasi kawasan bersejarah kawasan Keraton Kasunanan Surakarta (kondisi di lapangan), dan rekomendasi bentuk peranserta stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta (masa mendatang).

Studi ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dan pembobotan dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer. Adapun output yang diharapkan dari penelitian ini adalah bentuk peranserta stakeholder dalam revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu stakeholder yang paling dominan dalam upaya revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan adalah Pemkot Surakarta (Regulator dan Koordinasi-Perencanaan) dan institusi Keraton Kasunanan Surakarta (pemilik dan pengageng parentah Kawasan Keraton Kasunanan). Kedua pihak tersebut juga mempengaruhi kepentingan dan pengaruh tinggi dalam upaya revitalisasi, sedangkan masyarakat yang mempunyai kepentingan tinggi, tidak berpengaruh tinggi dalam upaya revitalisasi tersebut. Permasalahan yang terjadi antara lain kurang terkoordinasinya peranserta dari setiap stakeholder yang dapat dilihat dari lemahnya kontrol dan aspek legalitas, kurangnya keterlibatan masyarakat serta keterbatasan dari pihak keraton menyebabkan upaya revitalisasi ini belum dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh. Perbaikan aspek legalitas, peningkatan kualitas dan koordinasi antar stakeholder dalam berperanserta, dan peningkatan pendayagunaan serta pengelolaan kawasan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam revitalisasi kawasan Kasunanan selanjutnya.

*Kata kunci: kawasan cagar budaya, pelestarian, revitalisasi, peranserta, stakeholder*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan suatu bangunan kuno bersejarah mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Menurut Budihardjo, 1989 dikatakan bahwa terdapat beberapa arti penting dari keberadaan suatu bangunan kuno bersejarah antara lain secara ekonomis, bangunan kuno bersejarah akan merupakan salah satu daya tarik wisata, dari aspek sosial budaya terpeliharanya bangunan kuno akan menumbuhkan ikatan yang erat antara masa kini dan masa lampau dan menciptakan kebanggaan serta harga diri sebagai bangsa, dan menurut aspek fisik bahwa keberadaan bangunan kuno bersejarah akan memperkaya wajah lingkungan dan menciptakan identitas kota yang khas, unik dan berkarakter.

Kawasan bersejarah (cagar budaya) yang tidak tertata dengan baik dikhawatirkan nantinya akan semakin buruk kondisinya apabila tidak dilakukan penangangan yang serius. Kondisi yang demikian juga merupakan ancaman serius bagi kota secara tidak langsung karena dapat mempercepat penurunan kualitas fungsional, visual, maupun lingkungan. Salah satu upaya perbaikan lingkungan adalah revitalisasi kawasan. Upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan semua aspek yang terkait, baik yang sifatnya fisik dan non fisik maupun para aktor pelakunya (Effendi, 2001)

Persoalan yang sering muncul dalam pengembangan suatu kawasan, dalam hal ini kawasan bersejarah (cagar budaya) ada 3 unsur (3 Elemen Penggerak dalam Pembangunan Kota) yaitu masyarakat (*people*) yang menempati kawasan tersebut dalam beberapa periode tertentu dengan latar belakang tertentu. Unsur kedua adalah pihak pemerintah (*power*) yang mempunyai kewenangan dalam penentuan jenis pemanfaatan kawasan, dan unsur ketiga adalah pihak swasta (*profit*) yang turut berperan dalam pembangunan kota. Unsur masyarakat dan sejarah sering diabaikan sehingga terjadi ketidakseimbangan tuntutan dan kebutuhan, oleh karena itu agar upaya pelestarian kawasan cagar budaya dapat berhasil yang utama harus dilakukan adalah mendekati, mengimbau dan menyadarkan para penentu kebijakan dan pihak swasta tentang pentingnya pelestarian kawasan sebagai salah satu cara melindungi warisan budaya (Budihardjo,1993)

Kawasan historis (bersejarah) adalah kawasan dengan kekayaan sejarah dan budaya serta merupakan salah satu jejak peninggalan masa lalu dari sebuah kota atau kawasan. Salah satu usaha untuk memelihara, menjaga dan mempertahankan kawasan bersejarah adalah dengan revitalisasi. Revitalisasi merupakan salah satu kegiatan dalam pelestarian.

Revitalisasi adalah upaya untuk menata kembali suatu wilayah melalui peningkatan kualitas fisik dengan tujuan meningkatkan vitalitas sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik wilayah tersebut (Dokumen Pecinan dalam Hesti, 2005). Pengertian revitalisasi tersebut juga dapat diartikan menghidupkan kembali suatu kawasan yang sudah mati; meningkatkan kawasan yang sudah hidup; menyuntikan sesuatu yang baru (aktivitas dan bangunan) pada suatu kawasan. (Kimpraswil, 2003).

Perkembangan Surakarta pada jaman dahulu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran, Benteng Vastenburg sebagai pusat pengawasan kolonial Belanda terhadap Surakarta serta Pasar Gedhe Hardjonagoro (Thomas Kaarsten) sebagai pusat perekonomian kota. Apabila dihubungkan akan membentuk kawasan budaya dengan Keraton Kasunanan sebagai intinya. Perkembangan kota selanjutnya berlangsung di sekitar kawasan budaya ini.

Seiring dengan perjalanan sejarah terbentuknya Bangsa Indonesia, saat ini Keraton Surakarta bukan lagi menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang ada tetapi lebih merupakan supra sistem. Walaupun Keraton bukan lagi menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang ada, namun tetap menjadi bagian penting dari sistem sosial budaya masyarakat dalam hal ini sumber kebudayaan Jawa (Nurhadiantomo, 2003).

Program revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta dimulai dari renovasi lingkungan fisik di dalam tembok Keraton, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, dan akan disusul renovasi Masjid Besar Surakarta. Renovasi di dalam tembok Keraton dan kawasan sekitarnya walaupun belum maksimal, tetapi merupakan langkah awal yang sangat baik bagi revitalisasi Keraton secara menyeluruh. Bangunan-bangunan yang berada di luar tembok Keraton dan jauh dari pusat Keraton, baik yang berada di wilayah Kota Surakarta maupun di luar kota termasuk sejumlah pesanggrahan, tentunya masuk dalam program jangka panjang. Rencana pembangunan ruang atraksi di kompleks Balai Magangan, disamping untuk mendukung kegiatan pariwisata, juga untuk meningkatkan kegiatan kesenian. Rencana pembangunan gedung museum, selain renovasi gedung museum yang telah ada, disamping untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan dan perawatan benda-benda bernilai sejarah, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi tamu yang memerlukan (Wirabhumi, 2004)

Salah satu kunci keberhasilan dalam revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan ini adalah adanya peranserta dari tiap-tiap *stakeholder*. Pengertian *stakeholder* adalah mereka yang terpengaruh oleh suatu tindakan atau sehingga dianggap mempunyai hak untuk dikonsultasi, menyatakan pendapatnya, dan secara umum supaya kepeduliannya diperlakukan secara sungguh-sungguh yang dalam prosesnya, mereka yang berkepentingan atas suatu tindakan akan terseleksi secara alamiah. (P3WK ITB dalam Nazla Ulfah, 2003). Hubungan sinergis antara pemerintah,

pihak keraton, masyarakat maupun pihak swasta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upaya revitalisasi ini. Usaha revitalisasi kawasan bersejarah dalam hal ini kawasan keraton Kasunanan Surakarta merupakan suatu usaha yang memerlukan kerjasama antara *stakeholder* baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Tidak masalah siapa yang memiliki inisiatif untuk melakukannya, yang paling penting adalah bagaimana para *stakeholder* ini dilibatkan dalam usaha revitalisasi kawasan ini karena dengan perantara para *stakeholder* tersebut dapat membawa kesuksesan dalam melakukan usaha-usaha revitalisasi.

## 1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Kawasan Keraton Kasunanan merupakan inti dari kawasan cagar budaya di Kota Surakarta, namun dalam perkembangannya kawasan ini mulai kalah saing dengan keberadaan kawasan ekonomi yang ada di sekitarnya. Revitalisasi kawasan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan situs kawasan budaya Keraton Kasunanan. Upaya ini memerlukan perantara dari setiap stakeholder yang terkait, walaupun begitu upaya ini tidak mudah untuk dilakukan. Berbagai langkah revitalisasi kawasan Kasunanan telah dilakukan, antara melalui intervensi fisik yaitu perbaikan dan penataan fisik kawasan, selain itu juga dilakukan pemberian fungsi-fungsi baru pada bangunan-bangunan kuno tradisional yang ada di kawasan ini.

Upaya revitalisasi yang telah dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab Keraton Kasunanan Surakarta sebagai pemilik dan pengageng parentah di kawasan Keraton Kasunanan, tapi juga memerlukan dukungan dan perantara dari setiap stakeholder baik pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Hal ini karena keterbatasan dari pihak keraton dalam melakukan upaya-upaya revitalisasi. Konflik antar kepentingan dapat terjadi apabila kurang koordinasi antar stakeholder dalam berperantara. Hal tersebut memungkinkan untuk terjadi apabila stakeholder tersebut kurang terlibat, dan tidak menjalankan fungsi dan perannya serta memberikan dukungan penuh dalam upaya revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta sehingga upaya tersebut belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- Mulai retaknya hubungan antara Keraton dengan masyarakat setempat. Hal ini ditandai dari perilaku masyarakat yang mulai modern dan melupakan budaya-budaya Jawa (*Suara Merdeka, 17 Januari 2006*). Masyarakat saat ini lebih banyak diam (pasif) dan kurang kontribusinya dalam kegiatan revitalisasi kawasan Keraton.
- Pihak keraton sendiri saat juga mengalami beberapa permasalahan terkait dengan usaha revitalisasi kawasan keraton, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sumber daya pengorganisasian, dan terutama kemampuan finansial (*Mas Behi Angger-angger dan Perubahan Zaman, 2004*).